

**JAWABAN PEMERINTAH  
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM ANGGOTA DPR-RI  
TENTANG  
NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TAHUN ANGGARAN 2009**

---

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009.

Perkenankanlah kami, atas nama Pemerintah, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi dalam DPR-RI atas pandangan dan penilaian terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2009 beserta Nota Keuangannya, dan Dokumen Tambahan RAPBN 2009, yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2008 yang lalu. Semua pandangan dan penilaian yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi pada Forum Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2009 beserta Dokumen Tambahan RAPBN Tahun 2009 pada tanggal 20 Agustus 2008 lalu, merupakan masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan APBN Tahun Anggaran 2009.

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2009 disusun untuk memenuhi ketentuan pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Amandemen UUD 1945. Penyusunan RAPBN tahun 2009 mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004–2009, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2009. Saran dan pendapat DPR dan DPD RI dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2009 beberapa waktu yang lalu juga menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam menyusun NK dan RAPBN 2009 ini.

Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden, pemenuhan amanat konstitusi tentang anggaran pendidikan dan pemutakhiran asumsi harga minyak

telah menyebabkan postur RAPBN 2009 berubah. Berkenaan dengan itu, Pemerintah telah menyampaikan kepada Dewan yang terhormat, Dokumen Tambahan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2009.

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Di tengah berbagai guncangan eksternal, seperti melambatnya perekonomian dunia, dan gejolak harga minyak bumi dan pangan dunia, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 6,4 persen dalam semester pertama tahun 2008. Namun demikian, tantangan ke depan tidaklah semakin ringan. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Prinsip kehati-hatian dan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro selalu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah juga terus berupaya melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta upaya perluasan lapangan kerja. Sesuai dengan tantangan dan masalah yang dihadapi tersebut, maka dalam RKP tahun 2009, sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004-2009, ditetapkan tema “**Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Pengurangan Kemiskinan**”. Sesuai dengan tema itu maka di dalam RKP 2009 ditetapkan tiga prioritas pembangunan nasional yaitu: *Pertama*, peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan. *Kedua*, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi. *Ketiga*, peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan negeri.

Instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan diatas adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro didalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung tema dan prioritas diatas, maka kebijakan fiskal dalam tahun 2009 akan diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (*pro job*), serta mengurangi kemiskinan (*pro poor*). Ketiga prioritas pembangunan nasional tersebut kemudian dicerminkan di dalam arah dan postur RAPBN 2009. Dalam RAPBN 2009 Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.022,6 triliun, atau meningkat Rp127,6 triliun (14,3 persen) dari sasarannya dalam APBN-P tahun 2008. Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp1.122,2 triliun, atau naik Rp132,7 triliun (13,4 persen) dari pagu APBN-P tahun 2008. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2009, diperkirakan mencapai Rp99,6 triliun (1,9 persen dari PDB).

Peranan strategis lain dari kebijakan fiskal yang tidak boleh dilupakan adalah proses politik anggaran yang dilakukan secara transparan dengan prosedur yang relatif panjang, mulai dari perencanaan anggaran, implementasi, hingga pertanggungjawaban. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari peningkatan transparansi, demokratisasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kunci keberhasilan kebijakan fiskal dalam RAPBN 2009 akan sangat tergantung pada pemahaman bersama akan pentingnya perencanaan yang baik, pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawaban yang akuntabel, baik dari seluruh aparat yang terkait, maupun dari masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan fiskal.

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya, perkenankanlah kami memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai hal yang telah disampaikan oleh para juru bicara fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu masing-masing anggota yang terhormat **Sdr H. Musfihin Dahlan** mewakili **Fraksi Partai Golongan Karya**, **Sdr Nusyirwan Soejono**, **ST** mewakili **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, **Sdr Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi** mewakili **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, **Sdr Teuku Riefky Harsya** mewakili **Fraksi Partai Demokrat**, **Sdr DR. Didik J. Rachbini** mewakili **Fraksi Partai Amanat Nasional**, **Sdr Masduki Baidlowi** mewakili **Fraksi Kebangkitan Bangsa**, **Sdr Rama Pratama**, **SE, AK** mewakili **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, **Sdr Inya Bay**, **SE, MM** mewakili **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi**, **Sdr Ir. Junisab Akbar** mewakili **Fraksi Partai Bintang Reformasi**, dan **Sdr Carol Daniel Kadang**, **SE, MM** mewakili **Fraksi Partai Damai Sejahtera**.

Pertama-tama, kami ingin menanggapi pendapat **Fraksi Partai Golongan Karya**, **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, **Fraksi Partai Demokrat**, **Fraksi Partai Amanat Nasional**, **Fraksi Kebangkitan Bangsa**, **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dan **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi**, berkaitan dengan asumsi ekonomi makro sebagai berikut. Dalam penyusunan asumsi ekonomi makro RAPBN 2009, Pemerintah telah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang bergerak sangat dinamis, hingga informasi yang paling mutakhir. Proyeksi dan simulasi secara kuantitatif selalu dilakukan dan dimutakhirkan guna mengukur dan memperkirakan kecenderungan dan dampaknya terhadap beberapa indikator ekonomi makro, yang dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan RAPBN 2009.

Lebih dari itu, Pemerintah juga senantiasa menggunakan pendekatan yang realistis, didasarkan pada fakta riil yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal tertentu, Pemerintah juga menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dalam penetapan asumsi ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia (*ICP*) dan *lifting* minyak. Prinsip ini semata-mata ditujukan agar pelaksanaan APBN mendatang menjadi lebih aman.

Pemerintah bersikap lebih konservatif dalam menentukan asumsi *lifting* minyak, dengan tujuan target dapat terpenuhi. Hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah tidak melakukan upaya peningkatan *lifting* minyak. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan dalam rangka menemukan sumber-sumber minyak baru diharapkan akan mulai memberikan hasil pada akhir tahun 2008 ini. Untuk menggairahkan kegiatan pertambangan minyak, Pemerintah telah dan akan terus memberikan insentif fiskal, antara lain berupa pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas peralatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 177/PMK.011/2007 dan 178/PMK.011/2007. Di samping itu, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, Pemerintah juga berusaha melakukan revitalisasi pemanfaatan sumur minyak tua, yang diharapkan akan dapat menghasilkan minyak 5.000 sampai dengan 12.000 barel per hari.

Mengenai asumsi harga minyak ICP, pemerintah berpendapat bahwa asumsi harga ICP yang realistis untuk digunakan dalam penyusunan RAPBN 2009 adalah US\$100 per barel. Kami menyadari bahwa harga minyak dunia masih terus bergerak dan sangat sulit diprediksi. Dalam semester pertama tahun 2008, harga minyak melonjak di atas 40 persen mencapai US\$147 per barelnya. Namun, pada bulan Juli dan awal Agustus ini, harga minyak merosot hingga 20 persen, menjadi dibawah US\$115 per barelnya. Pemerintah mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2009, adalah sebesar US\$100 per barel. Harga ini masih dalam cakupan harga yang disepakati DPR yaitu antara US\$ 95-120 per barel.

Asumsi harga minyak tersebut, sudah mencerminkan perkembangan terakhir pergerakan harga minyak dunia dan berbagai proyeksi yang paling mutakhir. Meskipun demikian, pemerintah memandang perlu untuk tetap menjaga APBN dari risiko gejolak harga minyak terutama jika harga bergerak ke atas yang dapat terjadi seperti yang terlihat dalam kurun 18 bulan terakhir. Tingkat harga minyak tersebut, juga akan disertai penutupan risiko harga minyak ke atas pada tingkat US\$130. Hal ini disebabkan karena APBN kita jauh lebih rawan terhadap tekanan jika harga minyak yang lebih tinggi, dibanding jika harga minyak turun. Dengan demikian, kepercayaan terhadap RAPBN 2009 dapat terus terjaga.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Damai Sejahtera** mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi, dapat kiranya kami sampaikan bahwa Pemerintah optimis mengenai tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen dalam tahun 2009. Optimisme ini didasari oleh pencapaian laju pertumbuhan ekonomi 8 triwulan terakhir yang telah mencapai di atas 6 persen. Bahkan PDB Nonmigas, yang menjadi denyut nadi kehidupan ekonomi sebagian rakyat Indonesia, tumbuh mendekati 7 persen tahun lalu. Untuk mendorong kinerja sektor riil, Pemerintah telah/akan mengeluarkan berbagai kebijakan, terangkum dalam Inpres 5 Tahun 2008.

Pokok kebijakan tersebut antara lain, yaitu: (i) perbaikan iklim investasi seperti amandemen UU PPh dan PPN; (ii) percepatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan proyek listrik 10.000 MW; dan (iii) *Economic Partnership Agreement* (EPA).

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, antara lain ditempuh upaya penyederhanaan prosedur perijinan, peningkatan pelayanan dan fasilitas investasi (Unit Pelayanan Investasi Terpadu/UPIT); percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Ekonomi Khusus Investasi (KEKI); promosi investasi melalui *investment expo dan market intelligence*; modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai dan penerapan *National Single Window* (NSW), pemanfaatan teknologi satelit; serta peningkatan kepastian hukum melalui pemantapan koordinasi dan penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Di samping itu, Pemerintah memberikan insentif fiskal dalam bentuk kebijakan PPh yang dilakukan melalui perluasan PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, disamping dengan meningkatkan anggaran, Pemerintah juga melakukan kebijakan mengenai ketenagalistrikan dan transportasi, yang terdiri dari prasarana jalan, darat, laut, udara, dan kereta api.

Pada tahun 2008 yang lalu, pelaksanaan kesepakatan kerjasama kemitraan ekonomi atau EPA antara Indonesia dan Jepang telah efektif. Kesepakatan itu mencakup 3 pilar, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta *capacity building*.

Walau berbagai upaya telah dilakukan, namun kami tetap menyadari bahwa ketidakpastian masih bersama kita. Unsur ketidakpastian, ketidakstabilan dan fluktuasi perekonomian baik pada skala nasional maupun global merupakan hambatan yang paling besar didalam perencanaan APBN. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengkaji dengan seksama berbagai gejala perubahan dari sisi domestik maupun global, yang mungkin memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional dan APBN. Untuk mengantisipasi ketidakpastian, ketidakstabilan, dan fluktuasi perekonomian, Pemerintah telah menyediakan dana cadangan agar berbagai program pembangunan nasional dalam RAPBN 2009 tersebut tetap dapat terlaksana. Selain itu, Pemerintah telah mengalokasikan dana, dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Anggaran yang terkait dengan prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan akan senantiasa dijaga. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas, serta peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan negeri tetap menjadi agenda utama.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Bintang Reformasi** tentang adanya kesenjangan antara data dengan fakta di lapangan berkaitan dengan angka kemiskinan, dan pengangguran terbuka, dapat

disampaikan penjelasan sebagai berikut. Kinerja perekonomian yang relatif membaik dalam beberapa tahun terakhir, telah berdampak positif terhadap situasi ketenagakerjaan. Kondisi ini, pada akhirnya akan mendorong penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Data Susenas Maret 2008 menunjukkan bahwa penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,2 juta orang, dari 37,2 juta orang (16,58 persen) pada Maret 2007 menjadi 34,96 juta orang (15,42 persen) pada Maret 2008. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode tersebut, antara lain disebabkan oleh dua faktor utama sebagai berikut. *Pertama*, adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang telah menyebabkan kenaikan pengeluaran riil kelompok berpendapatan 40 persen terbawah. *Kedua*, terciptanya stabilitas harga seperti tercermin pada laju inflasi *y-o-y* (Maret 2008 terhadap Maret 2007) sebesar 8,17 persen, dan penurunan harga rata-rata beras nasional yang merupakan komoditi terpenting bagi penduduk miskin. Upaya penurunan tingkat kemiskinan ini dilaksanakan melalui beberapa program antara lain Askeskin, BOS, Raskin, PNPM, dan BLT. Sementara itu, dalam periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 9,75 persen pada Februari 2007 menjadi 8,46 persen pada Februari 2008. Penurunan ini disebabkan dalam periode tersebut telah tercipta 4,5 juta kesempatan kerja baru, sementara angkatan kerja meningkat 3,3 juta. Tren ini telah terjadi sejak tahun 2007.

Walaupun telah terjadi perbaikan dalam masalah kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, namun Pemerintah menyadari bahwa isu kemiskinan tersebut tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan merupakan sasaran penting bagi arah pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan pada tahun 2009.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai arti penting stabilitas ekonomi makro bagi percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah menyadari bahwa mempertahankan stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro, Pemerintah senantiasa memperbaiki koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dengan Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Pemerintah berupaya memperbaiki dan menjaga sistem distribusi ekonomi terutama dengan memperbaiki kondisi infrastruktur. Di samping itu, sejak tahun lalu, Pemerintah dengan persetujuan DPR telah meningkatkan anggaran untuk kegiatan produksi pangan. Pemerintah juga menyediakan dan menambah subsidi pertanian termasuk subsidi fiskal untuk meredam gejolak harga Internasional.

Dalam rangka mempercepat penurunan tingkat pengangguran, Pemerintah telah dan akan terus melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat agar menjadi sumber daya manusia yang mandiri. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya seperti Askeskin, BOS, Raskin, PNPM, dan BLT. Langkah lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas program

penanggulangan kemiskinan adalah dengan mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian negara dan lembaga ke dalam PNPM.

### **Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya ijinlah kami memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan rencana pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2009. Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai penurunan tarif PPh dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan penurunan tarif PPh Orang Pribadi dan PPh Badan, serta kenaikan PTKP bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi wajib pajak, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan penurunan tarif PPh Orang Pribadi (OP) mulai Januari 2009, diharapkan menjadi stimulus positif guna meningkatkan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga *tax ratio* dapat ditingkatkan. Selain itu, penurunan tarif PPh Badan diharapkan akan semakin menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian, efek dari kebijakan perpajakan tersebut akan berdampak positif dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi dampak negatif pelaksanaan kebijakan perpajakan tersebut dalam jangka pendek, Pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk memperluas basis wajib pajak dan obyek pajak, serta melakukan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi penerimaan perpajakan. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah melanjutkan program intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan. Program ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak (penambahan wajib pajak), melalui tiga pendekatan, sebagai berikut. *Pertama*, pendekatan berbasis Pemberi Kerja dan Bendaharawan Pemerintah, dengan sasaran karyawan, yang meliputi pemegang saham atau pemilik perusahaan, komisaris, direksi, staf, serta Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. *Kedua*, pendekatan berbasis properti, dengan sasaran orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. *Ketiga*, pendekatan berbasis profesi, dengan sasaran dokter, artis, pengacara, notaris, akuntan, dan profesi lainnya.

Sementara itu, perbaikan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan melalui program modernisasi sebagai pelaksanaan *good governance*, dengan strategi pelayanan prima, dan sekaligus pengawasan intensif kepada wajib pajak. Sampai dengan akhir tahun 2007, telah dimodernisasi 22 kanwil dan 202 KPP (3 KPP WP Besar, 28 KPP Madya dan 171 KPP Pratama di Jawa dan Bali). Pada tahun 2008, seluruh kantor di luar Jawa dan Bali direncanakan akan dimodernisasi dengan dibentuknya 128 KPP Pratama untuk menggantikan seluruh kantor pajak yang ada di daerah tersebut.

Selain itu, program pelaksanaan penghapusan sanksi pajak (*sunset policy*) yang mulai digulirkan Pemerintah pada tahun ini, diharapkan juga dapat berjalan sukses, sehingga penerimaan perpajakan dapat meningkat secara signifikan tahun depan.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Kebangkitan Bangsa** mengenai target penerimaan perpajakan, dapat kiranya disampaikan bahwa penetapan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2009, telah mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional di tahun 2009. Sementara itu mengenai kebijakan penurunan dan pembebasan tarif bea masuk, di satu sisi memang akan menurunkan penerimaan negara dari bea masuk, akan tetapi di sisi lain, penurunan tarif tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor riil, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan perpajakan, terutama Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian, pemberian fasilitas pembebasan dan penurunan tarif bea masuk, diharapkan tidak menyebabkan hilangnya peluang penerimaan pajak. Selain itu, penurunan dan pembebasan tarif bea masuk dalam tahun 2009 merupakan konsekuensi dari adanya kerjasama internasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi perdagangan antara dua negara, dan mendorong tingkat investasi asing di dalam negeri, yang secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Selanjutnya, untuk mengoptimisasikan penerimaan bea masuk, dalam tahun 2009 akan dilakukan upaya-upaya meningkatkan akurasi nilai pabean, mengoptimalkan penagihan bea masuk, memutakhirkan *data base* harga, meningkatkan peranan *post audit*, mengefektifkan pemanfaatan sarana operasi kapal patroli, dan lebih mengefektifkan pemberantasan penyelundupan.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** mengenai perlunya pengendalian *cost recovery* melalui pengendalian alokasi biaya, evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayai (*negative list*), serta evaluasi standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh KPS yang harus benar-benar menjadi perhatian Pemerintah, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki ketentuan *cost recovery*, melalui penyempurnaan ketentuan yang mengatur *cost recovery* secara detail/rinci dan jelas menggantikan ketentuan yang sifatnya masih umum yang berlaku selama ini. Pemerintah juga akan mengevaluasi biaya operasi yang dapat/tidak dapat dibebankan dalam *cost recovery* (*positive* dan *negative list*), dan menetapkan standar biaya atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan usaha hulu migas.

Perlu kami jelaskan pula bahwa dari hasil temuan audit BPKP dan BPK-RI, terdapat 33 item yang dibebankan berulang-ulang, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap temuan tersebut, 17 item terkait langsung dengan masalah biaya operasi, dan hal ini akan digunakan sebagai dasar Penyempurnaan Kebijakan dalam Pengembalian Biaya Operasi (*Recovery of Operating Cost*). Di antara ketujuh belas (17) item dimaksud antara lain adalah pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja KKKS antara lain: *personal income tax*, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi; pemberian insentif berupa *Long Term Incentive Plan* (LTIP) atau insentif lain yang sejenis; serta penggunaan tenaga kerja asing/*expatriate* tanpa melalui prosedur RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan tidak memiliki IKTA (Izin Kerja Tenaga Asing) bidang Migas dari BPMIGAS dan/atau Ditjen Migas.

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Sekarang, perkenankanlah kami memberikan tanggapan terhadap pokok-pokok pandangan Fraksi-fraksi berkenaan dengan kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2009. Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, mengenai perlunya Pemerintah melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten dengan didukung oleh reformasi birokrasi, dapat kiranya dijelaskan sebagai berikut. Mulai tahun 2009 ini, Pemerintah secara bertahap dan konsisten akan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Oleh karena itu, penyusunan anggaran akan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang dihasilkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sistem ini akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan, sehingga akan tercipta efisiensi anggaran.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** mengenai peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara dan para pensiunan dapat dijelaskan bahwa saat ini Pemerintah telah dan sedang melaksanakan reformasi birokrasi. Agenda reformasi yang telah dan masih terus dilaksanakan antara lain meliputi empat kegiatan, yaitu: (i) penataan organisasi, dengan tujuan mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing instansi; (ii) perbaikan *bussiness process*, yang meliputi kegiatan penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP), analisa dan evaluasi jabatan, dan analisa beban kerja (*Work Load Analyzis*); (iii) peningkatan manajemen SDM; dan (iv) perbaikan struktur remunerasi.

Sementara itu, untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, konsisten dan berdurasi jangka panjang, dilakukan pembahasan intensif untuk menyusun *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) Tahun 2008–2025. GDRB ini merupakan kerangka pikir strategis instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Saat ini Pemerintah juga sedang menyusun pedoman umum pelaksanaan reformasi birokrasi, dan melakukan pembahasan intensif atas penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sebagai landasan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pemerintah sependapat dengan anggota Dewan yang terhormat agar kenaikan gaji aparatur negara dan pensiunan dilakukan bersamaan dengan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur negara melalui upaya reformasi birokrasi. Dengan itu diharapkan kenaikan gaji bukan hanya bermakna untuk sekedar meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan PNS saja, tetapi juga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, profesional, dan kompetitif. Birokrasi yang efisien dan efektif merupakan prasyarat terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat yang bebas KKN.

Selanjutnya, menanggapi usulan besaran persentase kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok, dapat kiranya dijelaskan bahwa Pemerintah senantiasa

memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam RAPBN tahun 2009, Pemerintah mengusulkan peningkatan kesejahteraan PNS dan pensiunan. Hal ini tercermin dalam rencana pemberian gaji dan pensiun pokok ketigabelas bagi PNS dan para pensiunan serta peningkatan gaji pokok bagi PNS dan peningkatan pensiun pokok bagi pensiunan sebesar 15 persen. Kenaikan gaji pokok tersebut diharapkan dapat memperbesar rasio perbandingan gaji pokok terendah dengan gaji pokok tertinggi menjadi sekitar 1 : 3,4.

Menanggapi dukungan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi** terhadap pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen sesuai amanat UUD 1945, Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan tersebut. Peningkatan anggaran pendidikan tersebut juga akan disertai dengan upaya peningkatan efektivitas pemanfaatan, dan sekaligus pengawasannya. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, di samping dimaksudkan untuk memenuhi amanat konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi, juga merupakan tekad yang sungguh-sungguh dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah sepakat bahwa kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan tersebut harus digunakan secara maksimal untuk memperbaiki kinerja pendidikan, khususnya dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

Pemerintah berketetapan untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang berkualitas melalui penyediaan layanan pendidikan yang murah dan mudah dijangkau. Perhatian besar akan diberikan pada anak-anak yang kurang beruntung, termasuk di antaranya anak-anak dari keluarga miskin, yang tinggal di wilayah tertinggal, terpencil, dan kepulauan, serta anak-anak dengan kebutuhan khusus. Perhatian tidak hanya diberikan melalui penyediaan beasiswa, tetapi juga penyediaan fasilitas layanan pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Ke depan diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah juga sepakat untuk semaksimal mungkin menyelesaikan rehabilitasi sekolah/madrasah yang rusak, khususnya untuk jenjang SD/MI melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan secara signifikan. Selain itu, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta membiayai rehabilitasi sekolah/madrasah di wilayah masing-masing dari sumber lain di luar DAK. Dengan demikian, masalah kerusakan sekolah/madrasah dapat segera terselesaikan, sehingga anak-anak Indonesia selain dapat bersekolah dengan aman dan nyaman, juga dapat belajar dengan lebih baik.

Sejalan dengan itu, mutu dan relevansi pendidikan akan ditingkatkan agar hasil pendidikan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kualitas dan kesejahteraan pendidik

juga akan ditingkatkan, dengan harapan mereka akan dapat mengajar secara lebih baik, hidup secara lebih layak, dan lebih berkonsentrasi dalam melakukan pembelajaran. Peningkatan kesejahteraan guru tidak hanya dilakukan pada guru PNS, tetapi juga guru Non-PNS melalui penambahan subsidi tunjangan fungsional guru. Penyediaan masalah tambahan bagi guru juga diharapkan dapat memacu guru untuk lebih berprestasi.

Selanjutnya, pemberian beasiswa prestasi, termasuk untuk para pemenang olimpiade dilakukan untuk memberi peluang guna meningkatkan pengetahuan secara maksimal. Para pemenang olimpiade bahkan akan diberi beasiswa ke universitas manapun di dalam negeri atau luar negeri, sesuai pilihannya sampai dengan program doktoral. Diharapkan pengetahuan mereka dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan daya saing.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengelola anggaran pendidikan secara lebih baik, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel, yang diikuti dengan pengendalian dan pengawasan secara lebih ketat. Dengan demikian, seluruh anggaran yang telah disediakan diharapkan dapat memberikan manfaat secara maksimal.

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi**, mengenai masih rendahnya anggaran infrastruktur dan perlunya Pemerintah fokus pada perbaikan infrastruktur untuk mendukung investasi dapat kiranya dijelaskan bahwa Pemerintah sependapat dengan hal tersebut. Pemerintah secara konsisten telah menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, antara lain dengan diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008 – 2009. Inpres yang merupakan kesinambungan dari Inpres Nomor 6 Tahun 2007 ini tidak hanya berisi kegiatan yang bersifat reformasi kebijakan, melainkan juga memuat antara lain langkah konkrit pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian nasional, seperti mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu, serta pembangunan dan operasionalisasi jalur Kereta Api Bandara.

Didalam Rencana Kerja Pemerintah 2009, dukungan infrastruktur dalam mendorong sektor riil diprioritaskan pada Prioritas II “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi” dengan fokus Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah akan pentingnya infrastruktur tersebut.

Perlu kiranya disampaikan bahwa alokasi anggaran infrastruktur bukan hanya bersumber dari APBN, namun juga berasal dari BUMN dan swasta. Dalam kaitan itu, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong peran serta pihak swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui bentuk kerjasama pemerintah dan swasta (*public private partnership*). Dengan demikian, Pemerintah mencoba melengkapi instrumen anggaran (*budget instrument*) yang ada dengan instrumen kebijakan (*policy instrument*), yang dibuat untuk menciptakan

investasi yang kondusif bagi partisipasi swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Dalam kaitan ini, berbagai kebijakan dan regulasi dalam rangka menarik minat swasta dalam pembangunan infrastruktur telah dikeluarkan oleh Pemerintah sejak tahun 2005.

Seiring dengan tekad Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempertahankan daya saing internasional, maka anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahunnya terus ditingkatkan. Pada tahun 2005, anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur mencapai Rp19,68 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp63,78 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 224,08%.

Selanjutnya, menanggapi pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai alokasi subsidi yang masih cukup tinggi, dan saran **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat**, dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar kenaikan anggaran subsidi harus mencapai sasaran, dan tepat sasaran kepada rakyat yang memang pantas, serta pengendalian harga dan konsumsi BBM dan TDL, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tujuan pengalokasian subsidi adalah agar harga jual barang kebutuhan pokok dapat terjangkau oleh masyarakat. Tingginya alokasi subsidi dalam RAPBN 2009 terkait dengan fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang cenderung meningkat. Kenaikan ICP pada gilirannya juga berpengaruh terhadap harga barang kebutuhan pokok, yang menggunakan BBM sebagai salah satu inputnya. Oleh karena itu Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian harga BBM. Pemerintah berupaya melakukan penyesuaian harga jual eceran BBM dalam negeri mendekati harga keekonomian dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan negara. Hal ini dilakukan agar BBM yang disubsidi oleh Pemerintah lebih tepat sasaran. Dalam hal ini pemerintah sependapat bahwa kebijakan pemberian subsidi tidak bersifat parsial ataupun *ad hoc*, tetapi harus bersifat komprehensif yang alokasinya harus ada setiap tahun.

Sementara itu, dalam upaya untuk mengendalikan harga BBM dan TDL, Pemerintah telah melakukan diversifikasi dan konservasi energi pada sisi *supply* dan *demand*. Program diversifikasi antara lain dilaksanakan melalui konversi minyak tanah ke LPG, Pengembangan Desa Mandiri Energi, pengembangan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN). Selain itu juga dilakukan upaya percepatan pembangunan pembangkit listrik non-BBM (PLTU 10.000 MW), MFO-nisasi pembangkit listrik yang sebelumnya menggunakan bahan bakar diesel, serta penggunaan energi alternatif, misalnya briket batubara, biogas, CNG untuk transportasi, LGV untuk transportasi, dan gas kota untuk rumah tangga. Untuk program konservasi pemerintah melakukan penerapan kartu kedali untuk minyak tanah, gerakan hemat energi, peningkatan efisiensi pembangkit listrik, penurunan susut (*losses*) jaringan (terutama *losses* nonteknis), pengurangan pemakaian energi listrik pada waktu beban puncak (program daya *max-plus*

untuk industri dan himbauan kepada masyarakat umum untuk menghemat pemakaian listrik pukul 17.00-22.00).

Untuk mengendalikan konsumsi BBM dan listrik, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengurangi subsidi BBM, antara lain dengan pemanfaatan energi alternatif yang harganya lebih murah, dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sedangkan untuk menurunkan subsidi listrik, Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya untuk menurunkan BPP tenaga listrik melalui program penghematan penggunaan pemakaian listrik oleh pelanggan (*demand side*); dan program diversifikasi energi primer di pembangkitan tenaga listrik (*supply side*).

Disamping itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air dengan melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi untuk bangunan beserta peralatannya yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta mendorong masyarakat termasuk perusahaan swasta untuk melaksanakan penghematan energi.

Dengan demikian, melalui langkah-langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan konsumsi dan ketergantungan masyarakat terhadap BBM, yang pada gilirannya harga jual BBM dan tarif dasar listrik dapat dikendalikan pada harga tertentu.

Selanjutnya, berkenaan dengan kebijakan dan alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2009 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah pada prinsipnya sependapat dengan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah sesuai dengan tujuan alokasi DAU. Upaya peningkatan pemerataan keuangan daerah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 27 UU No.33 Tahun 2004, dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 (dua puluh enam) persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN.

Sementara itu, berkaitan dengan fluktuasi harga minyak dan pangan dunia, serta melesunya perekonomian global, dalam RAPBN 2009 DAU nasional direncanakan sebesar 26 persen dari PDN Neto dengan memperhitungkan subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi pupuk sebagai bentuk berbagi beban (*sharing the pain*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, besaran Transfer ke Daerah secara keseluruhan dalam RAPBN 2009 tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp11,5 triliun, dari Rp292,4 triliun dalam APBN-P 2008 menjadi Rp303,9 triliun. Kenaikan anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2009 tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ekualisasi kemampuan fiskal antardaerah, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk mereformulasi DAU 2009 dengan tetap mengacu pada koridor yang telah diatur

dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, dan PP Nomor 55 Tahun 2005, khususnya mengenai kebijakan penerapan formula DAU secara murni. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten terus berupaya melakukan penyempurnaan formulasi DAU, setiap tahun dengan melibatkan tim universitas, instansi penyedia data, dan *stakeholder* terkait. Penyempurnaan itu dilakukan antara lain dengan melakukan *review* terhadap bobot-bobot komponen gaji PNSD dalam Alokasi Dasar, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal. Pengkajian dan evaluasi terhadap bobot-bobot variabel perhitungan DAU secara menyeluruh tersebut, pada hakikatnya ditujukan untuk mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah, dan sebagai instrumen (*tools*) dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Indikator yang digunakan dalam meminimalkan kesenjangan fiskal tersebut antara lain adalah *Coefficient of variation* dan *Williamson Index*, dalam rangka mendapatkan tingkat pemerataan alokasi DAU yang terbaik. Untuk itu, rata-rata alokasi per daerah tidak didasarkan pada komposisi jumlah daerah yang berada di atas atau di bawah rata-rata, namun lebih mengedepankan pada aspek pemerataan keuangan antardaerah per kapita. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dialokasikan melalui DAU dapat dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada setiap penduduk di daerah, dan bukan pemerataan berdasarkan jumlah daerah, karena masing-masing daerah memiliki karakteristik potensi ekonomi dan kebutuhan fiskal yang bervariasi.

Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut, pada tahun 2009 sebagai kelanjutan dari kebijakan tahun 2008, terdapat perubahan yang signifikan dalam kebijakan pengalokasian DAU, yaitu melaksanakan formula murni secara penuh. Perhitungan DAU tahun 2009 berdasarkan formula murni tersebut, akan menghasilkan alternatif alokasi DAU sebesar nol (tidak mendapatkan DAU), lebih kecil, sama dengan, dan lebih besar dari DAU tahun 2008.

Dengan demikian, melalui reformulasi dana perimbangan yang dilakukan Pemerintah bersama DPR-RI untuk memperbaiki formula DAU dalam forum pembahasan RAPBN tahun 2009, maka hasil perhitungan DAU tahun 2009 diharapkan dapat mengatasi kesenjangan fiskal antardaerah, dan mendukung secara efektif upaya pengurangan ketimpangan penyediaan pelayanan publik dan pembangunan antardaerah.

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Sehubungan dengan tanggapan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera** mengenai defisit dan pembiayaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Besaran defisit yang mencapai 1,9 persen PDB dalam tahun 2009 masih dianggap wajar dan masih sesuai dengan kondisi dan kemampuan fiskal negara saat ini. Defisit tersebut

masih dalam *range* yang disepakati oleh Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah yaitu sebesar 1,5-2,0 persen dari PDB. Namun demikian, Pemerintah setuju dengan pendapat bahwa pada tahun-tahun mendatang, besaran defisit anggaran harus dapat ditekan/diperkecil tanpa harus menghalangi aktivitas/ekspansi kegiatan perekonomian nasional.

Sampai saat ini, penerimaan negara masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan belanja negara, sehingga dalam konteks belanja negara yang mampu memberikan stimulus fiskal, APBN masih mengalami defisit. Sumber pembiayaan defisit yang tersedia, terutama dari perbankan dalam negeri, pinjaman program, privatisasi, dan sebagainya, jumlahnya dari waktu ke waktu semakin terbatas. Melihat kondisi tersebut, maka sumber pembiayaan yang berasal dari utang khususnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tetap diperlukan. Dalam menentukan penggunaan sumber pembiayaan tersebut, Pemerintah memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik dengan mempertimbangkan beban biaya yang paling murah pada tingkat risiko yang terkendali. Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa berupaya agar pasar SBN domestik menjadi semakin likuid, aktif, dalam (*deep*) dan stabil.

Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga besaran defisit pada tingkat yang cukup aman bagi perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah secara konsisten melakukan upaya dalam menurunkan rasio utang terhadap PDB dengan menjaga pertumbuhan utang pada tingkat yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB, agar kesinambungan fiskal dapat tetap terjaga. Hal yang sama juga dilakukan terhadap rasio biaya dan bunga utang terhadap PDB maupun terhadap belanja negara yang diusahakan tetap menurun agar Pemerintah memiliki kelonggaran dalam menetapkan kebijakan belanja negara, sehingga dapat meningkatkan stimulus fiskal.

Dalam melakukan utang, Pemerintah senantiasa berhati-hati. Penambahan utang neto yang dapat dilakukan pemerintah didalam satu tahun anggaran selalu dibahas sebagai satu kesatuan dengan pembahasan APBN, dan memerlukan persetujuan Dewan. Selain tu pemerintah juga terus melaporkan realisasi penambahan utang yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran dalam pembahasan realisasi APBN maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Khusus menanggapi masukan dari **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi** mengenai kebijakan anggaran tanpa defisit di tahun-tahun mendatang, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. Kebijakan anggaran defisit tidak sepenuhnya berkonotasi negatif, sepanjang dalam pelaksanaannya dapat dikendalikan dan tidak mengganggu keberlanjutan kebijakan fiskal. Bersamaan dengan itu, harus dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan baik dari perpajakan dan PNBPNP.

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Demikianlah jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat berkenaan dengan Nota Keuangan dan RUU tentang APBN TA 2009. Tanggapan atas Pemandangan Umum lebih lanjut akan kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian tidak terpisah dari jawaban yang telah kami sampaikan ini.

Akhirnya atas nama Pemerintah, kami menyambut baik ajakan Dewan yang terhormat untuk bersama-sama membahas RAPBN Tahun Anggaran 2009 secara lebih mendalam dan cermat pada tahap selanjutnya, atas dasar prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanat rakyat, sehingga kewajiban mulia yang terbentang di pundak Pemerintah dan Dewan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr wb

Jakarta, Agustus 2008

A.N. PEMERINTAH

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI